

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Penyelamatan Bangsa

Penyelamatan adalah proses, cara, perbuatan (<http://www.artikata.com/arti-377217-penyelamatan.html>).

Istilah bangsa adalah terjemahan dari kata nation dan nation berasal dari bahasa Latin; *natio* yang artinya suatu yang lahir. Nation dalam istilah bahasa Indonesia artinya bangsa. Dalam perkembangan selanjutnya konsep bangsa memiliki pengertian dalam arti sosiologis antropologis dan politis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintah sendiri (<http://leonheart94.blogspot.com/2011/01/pengertian-bangsa.html>).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelamatan bangsa adalah suatu proses dalam satu asal keturunan, adat, bahasa dalam upaya menyelamatkan pemerintahannya.

2. Konsep Karesidenan

Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an. Sebuah karesidenan terdiri atas beberapa *afdeeling* (Kabupaten). Tidak di semua provinsi di Indonesia pernah ada karesidenan. Hanya di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Lombok dan Sulawesi saja. Biasanya ini daerah-daerah yang penduduknya banyak. (Wikipedia Indonesia)

Kata karesidenan berasal dari Bahasa Belanda *Residentie*. Sebuah karesidenan dikepalai oleh residen, yang berasal dari Bahasa Belanda *Resident*. Di atas residen adalah gubernur jenderal, yang memerintah atas nama Raja dan Ratu Belanda.

Semenjak krisis pada tahun 1950-an, sudah tidak ada karesidenan lagi dan yang muncul faktor kekuasaannya adalah Kabupaten. Karesidenan kemudian dikenal dengan istilah "*Pjembantu Gubernur*" (istilah ini sekarang tidak digunakan lagi). Namun demikian, sebutan "*eks-karesidenan*" masih dipakai secara informal.

Sebuah sisa pemakaian **karesidenan** adalah tanda kendaraan bermotor (pelat nomor). Pembagiannya, terutama di pulau Jawa masih banyak berdasarkan karesidenan (<http://id.wikwpedia.org/wiki/karesidenan>)

2. Konsep Keresidenan Lampung

Keresidenan Lampung sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang, yang pada waktu itu dalam tahun 1943, oleh panglima Tertinggi Tentara kedupuluh lima dibentuk pemerintahan sipil di Pulau Sumatera, yang membagi Pulau Sumatera ke dalam 9 (sembilan) Keresidenan (*syu*), yaitu Sumatera timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka-Biliton (Dewan Harian Daerah Angkatan 45, 1990:105).

Lampung terbagi dari *onder Afdelling* yang masing-masing dikepalai oleh Konstruler ini dipegang oleh bangsa Belanda. Residen berkedudukan di Teluk Betung. Pembagian wilayah Indonesia menjadi Keresidenan ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang pertama-tama wilayahnya dibagi menjadi beberapa Keresidenan adalah di Pulau Jawa. Residen adalah pegawai pamong praja yang mengkepalai daerah (bagian dari Provinsi yang meliputi kabupaten, dll) (Balai Pustaka, 1997:745).

Hal ini diperkuat dengan pendapat The Liang Gie yang mengatakan bahwa Residen adalah kepala pemerintahan Keresidenan, langsung berada dibawah Gubernur (1993:68), sedangkan pengertian Keresidenan sendiri adalah daerah yang dikepali oleh seorang Residen, wilayahnya membawahi Kabupaten, Kawedanan (Balai Pustaka, 1997:745).

Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil suatu pengertian tentang Kerasidenan. Kerasidenan adalah suatu pemerintahan yang berada dibawah kekuasaan Gubernur dan dipimpin oleh seorang Residen yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Sebelum memulai menjabat jabatannya, ia mengucapkan sumpah dihadapan yang diberi kuasa oleh Gubernur dan seorang Residen harus bertempat tinggal ditempat Kerasidenan yang

dipimpinnya. Sedangkan Karesidenan Lampung adalah suatu pemerintahan yang berada di Kota Lampung yang berada dibawah kekuasaan Gubernur dan dipimpin oleh seorang Residen yang bertanggung jawab kepada Gubernur yang merupakan bagian dari Pulau Sumatera.

3. Konsep Agresi Militer Belanda II

Agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan serangan dadakan bagi TNI dan masyarakat Indonesia, sebab Panglima Territorium Sumatera pernah mengatakan bahwa tidak akan ada serangan pasukan Belanda sebelum tanggal 15 Januari 1949. Pasukan TNI sama sekali tidak menduga akan ada pendaratan satu datesemen komando tentara Belanda di Danau Singkarak. Gerak maju pasukan Belanda yang pesat dikedua front, yaitu front utara dan front timur yang dibarengi dengan penembakan-penembakan dari udara oleh pesawat pemburu. Markas-markas induk TNI seperti markas Batalyon, markas Resimen dan markas Divisi tergesa-gesa meninggalkan lokasi yang sebelumnya berada didaerah perkotaan yang tidak terjangkau oleh pasukan Belanda (<http://basaraja.wordpress.com/2012/10/17/agresi-militer-belandan-kekoto-tinggi>).

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, Ibukota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya Ibukota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang

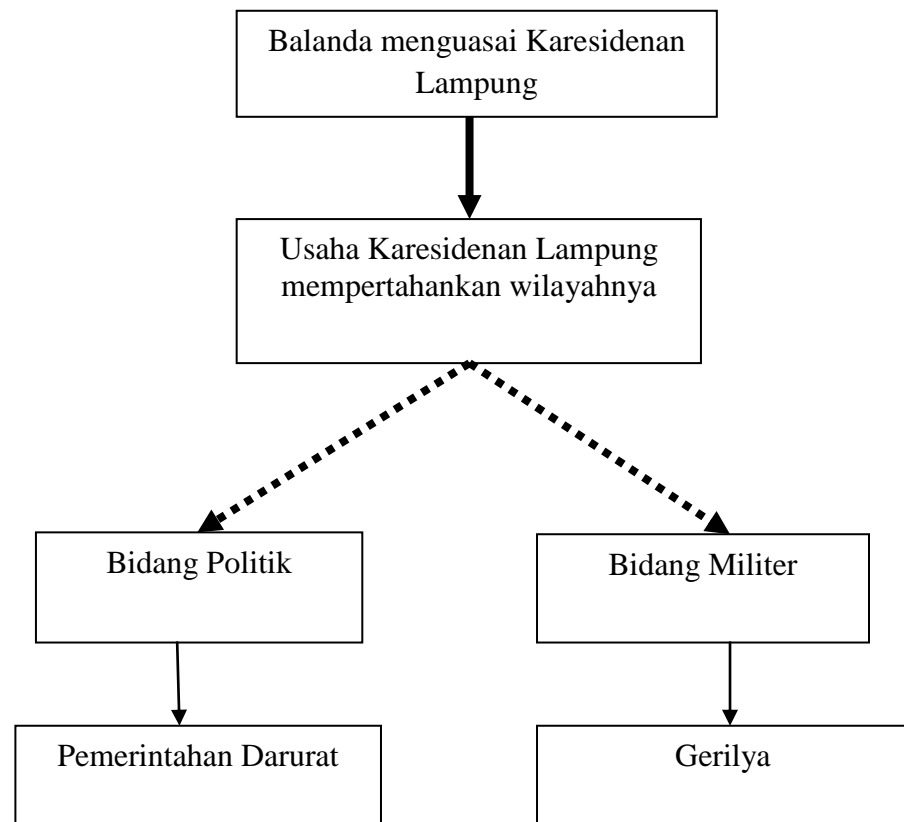
dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan (Wikepidea Indonesia).

A. Kerangka Pikir

Pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 06.00 pagi, agresi militer kedua di lancarkan Belanda, dengan pasukan lintas udara, serangan langsung di tujukan ke Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta. Angkatan perang yang telah membagi wilayah pertahanan republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatera, siap melaksanakan rencana di bidang pemerintahan tersebut. Di Lampung agresi militer kedua (Clash II) baru dimulai tanggal 1 Januari 1949, Belanda masuk ke Teluk Lampung melalui Kalianda menuju Pelabuhan Panjang. Kira-kira pukul 05.00 pagi, kapal perang Belanda mulai menembaki pelabuhan Panjang. Tetapi karena perlawanan dari pihak tentara kita di Panjang, baru setelah kira-kira jam 06.00 mereka dapat mendarat di pantai luar pelabuhan Panjang dan dipantai sekitar gunung Kuntit Telukbetung. Ibukota Karesidenan akhirnya dapat diduduki oleh pasukan Belanda pada hari itu juga. Karena peristiwa inilah Pemerintahan Karesidenan beserta staf-nya menyingkir ke luar ibu kota Lampung untuk menghindari serangan Belanda.

Dengan keadaan inilah maka di bentuk pemerintahan darurat karesidenan lampung untuk memperkuat pertahanan dari serangan Belanda dan membuat basis pertahanan di setiap daerah untuk menghindari dan melawan serangan Belanda.

C. Paradigma



Keterangan:

—————> Garis hubungan

-----> Garis usaha

REFERENSI

Suryabrata, Sumardi. 1983. *Metodologi Penelitian*. CV Rajawali. Jakarta:
Halaman 69.

Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Pajar Agung. Jakarta:
Halaman 21.